

KEBIJAKAN POLITIK KOLONIAL JEPANG TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Nabhan Halim Al Azhar Siregar¹, Faridi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Malang

Email: nabhanhalimas@gmail.com¹, faridi_umm@umm.ac.id²

Abstract: *This article discusses the political policies of the Japanese colonial administration toward Islamic education in Indonesia. In reality, Islamic education in Indonesia has experienced significant fluctuations, largely dictated by those in power and their authority to shape governing policies. Historically, Japan played a pivotal role in determining these educational directives. Several key policies implemented during the Japanese occupation had a profound impact on Islamic education, including indoctrination efforts, the prohibition of the Dutch language, and the elimination of the dualistic educational system.*

Keywords: *Policy, Japan, Islamic Education.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang kebijakan politik kolonial Jepang terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Faktanya pendidikan Islam di Indonesia mengalami pasang dan surut tergantung siapa yang mempunyai peran dan yang menjadi penguasa pada saat itu di Indonesia yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Dalam sejarah di antara yang mempunyai peran dan kuasa dalam menentukan kebijakan dalam pendidikan Islam adalah Jepang. Terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan Jepang yang berdampak pada pendidikan Islam di Indonesia seperti upaya Indoktrinasi, pelarangan bahasa belanda, penghapusan dualisme dan lain-lain.

Kata Kunci: Kebijakan, Jepang, Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan terlebih kebijakan dalam pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, faktanya mengalami pasang dan surut. Hal tersebut terjadi tergantung siapa yang mempunyai peran dan siapa yang berkuasa dalam menentukan kebijakan-kebijakan tersebut (Hoddin, 2020). Dalam sejarah di antara yang mempunyai peran dan kuasa dalam menentukan kebijakan dalam pendidikan Islam adalah Jepang.

Sejarah mencatat bahwa Jepang merupakan salah satu negara Asia yang pernah menjajah sekaligus berkuasa di Indonesia. Pada masa penjajahannya sekitar 3,5 tahun pemerintahan Jepang menjajah nusantara, memang lebih singkat daripada belanda yakni sekitar 350 tahun, namun dalam waktu tersebut Jepang tentu memiliki kebijakan-kebijakan politiknya yang diterapkan dalam bidang pendidikan di Indonesia yang tentu memiliki perbedaan dengan kebijakan pemerintahan kolonial Belanda (Rohman, 2018) (Ramadhani, 2021).

Pada mulanya pengalihan kekuasaan dari kolonial Belanda kepada Jepang disambut dengan sangat gembira oleh rakyat Indonesia. Hal demikian dikarenakan akan muncul sebuah harapan sekaligus keinginan dari masyarakat Indonesia agar bisa segera melepaskan diri dari penjajahan serta keinginan dan cita-cita menjadi sebuah negara yang merdeka. Penyambutan baik ini, di sisi lain oleh Jepang menjadikan mereka terus menerus melakukan upaya propaganda-propaganda demi menarik simpati, minat dan kepercayaan masyarakat Indonesia agar kedudukannya tetap bertahan di Indonesia (Ramadhani, 2021).

Ketika berkuasa Jepang melakukan berbagai upaya kebijakan untuk mempengaruhi dan merubah pendidikan di Indonesia, dengan tujuan utamanya yaitu menguasai dan menjajah. Kebijakan yang dilakukan Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia pada saati itu tujuannya juga tidak lebih untuk mendukung perang yang sedang dijalankan Jepang pada saat itu (Hudaidah & Karwana, 2021).

Di antara kebijakannya, Jepang secara sporadis dan hegemonik membumihanguskannya, baik dari aspek kurikulum, kelembagaan, sarana-prasarana, kiai, guru, murid, dan sebagainya. Bahkan demi menundukkan dan menjinakkan bangsa Indonesia, Jepang melakukan penutupan sekolah-sekolah modern seperti Sekolah Schakel Muhammadiyah dan secara bertahap juga melarang sekolah agama atau madrasah (Saifudin & Saepuddin, 2020).

Dari latar belakang di atas, kajian dan penelitian tentang Kebijakan Politik Kolonial Jepang Terhadap Pendidikan Islam Di Indoensia menarik untuk dikaji. Di sini akan diketahui bagaimana pendidikan Islam dapat bertahan melawan kekejaman penjajahan Jepang. Demikian pula akan tergambar apa dan

bagaimana umat Islam menyelenggarakan pendidikan Islamnya pada saat bangsa Indonesia dijadikan alat militer Jepang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis *library research* atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah kegiatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dokumen, laporan penelitian, dan media relevan lainnya (Mahmud, 2011; Sholeh, dalam Zed, 2008). Penelitian kepustakaan disini dilakukan melalui tahapan sistematis mulai dari mengidentifikasi sumber, mengumpulkan bahan, membaca secara mendalam, mencatat informasi yang penting, sampai menganalisis dan menyusun data ke dalam sebuah laporan penelitian (Nazir, 2003; Zed, 2008). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali teori dan informasi empiris yang relevan dengan topik secara mendalam, serta membangun kerangka berpikir yang kuat berdasarkan literatur yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedatangan Jepang Ke Indonesia

Sebelum datang ke wilayah Indonesia, Jepang terlebih dahulu sudah melakukan upaya pemberitahuan akan kedatangannya melalui siaran radio Tokyo. Selain upaya pemberitahuan akan kedatangannya melalui siaran radio Jepang juga melakukan upaya lainnya, yaitu penyebaran pamflet-pamflet dengan menggunakan pesawat tempur yang disebarkan dari atas pesawat tempur tersebut di berbagai wilayah Indonesia (Aslan, 2019).

Jepang masuk dan tiba di Indonesia melalui daerah Ambon pada bulan Januari tahun 1942. Namun, Jepang masuk dan tiba di

Indonesia tidak dengan jalan yang mudah, karena pada saat itu tentara Hindia Belanda dan pasukan Australia sangat berusaha menghalangi masuknya Jepang. Namun, sebab kekuatan Jepang yang tidak terkalahkan pada saat itu, Jepang pada akhirnya berhasil menang dan menguasai seluruh daerah kepulauan Maluku, bahkan selanjutnya Jepang mampu menguasai daerah Tarakan, Balikpapan lalu masuk ke daerah Pontianak serta menyerang pulau Sumatera (Ramadhani, 2021).

Pada bulan selanjutnya, yakni bulan februari pada tahun yang sama Jepang mulai melakukan upaya penyerangan pulau Jawa yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Dibentuklah komando gabungan ABDACOM, yaitu American, British, Dutch dan Australian Command yang bermarkas di Lembang sebagai upaya untuk menghadapi Jepang. Lalu pada tanggal 1 bulan Maret 1942 pasukan Jepang mendarat di tiga tempat berbeda di daerah Jawa yaitu Banten, Indramayu dan Bojonegoro. Belanda tidak menduga pendaratan Jepang ini sehingga dengan cepat pasukan Jepang melakukan upaya penyerbuan ke pusat-pusat kekuatan Belanda (Ramadhani, 2021).

Pada tanggal 5 bulan Maret tahun 1942 akhirnya kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda berhasil jatuh ke tangan bangsa Jepang. Begitu juga diikuti dengan kota-kota lainnya yang dengan mudah dapat dikuasai oleh bangsa Jepang, bahkan hampir tanpa ada perlawanan yang berarti. Akhirnya, tepat tiga hari setelahnya atau lebih tepatnya pada tanggal 8 maret setelah kota Batavia sebagai pusat pemerintahan pada saat itu jatuh ke tangan Jepang, pasukan Belanda pun mengakui menyerah kepada Jepang ditandai dengan penyerahan tidak bersyarat Belanda yang pada saat itu ditanda tangani oleh Ter Poorten sebagai wakil dari Belanda dan jendral Imamura sebagai

wakil dari bangsa Jepang yang dilakukan di daerah Kalijati kota Subang. Dengan demikian berakhirilah masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, digantikan oleh bangsa Jepang (Ramadhani, 2021).

Sebagaimana telah disebutkan dalam pendahuluan, pada mulanya kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia sangat disambut dengan gembira, senang hati dan dengan tangan terbuka. Bahkan penyambutan baik ini dapat dilihat dari banyaknya orang mengucapkan kata *banzai* yang dalam bahasa Indonesia artinya selamat datang. Sambutan positif ini merupakan wujud rasa syukur dan rasa lega oleh rakyat Indonesia karena telah terbebas dari belenggu penjajahan kolonial Belanda selama ratusan tahun (Ramadhani, 2021).

2. Kebijakan Politik Kolonial Jepang Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia

Setelah terusirnya bangsa Belanda dari tanah Indonesia oleh bangsa Jepang pada tahun 1942, Jepang sebagai penguasa baru di Indonesia pada saat itu mengeluarkan kebijakan pendidikan Islam yang pada awalnya terlihat berpihak terhadap umat Islam, namun sebenarnya hal itu dilakukan hanya sebatas pengelabuan belaka, sebab ternyata mempunyai kepentingan agar umat Islam tertarik, merasa tidak dimusuhi serta agar berpihak kepada Jepang dalam perang Dunia II. Di antara kebijakan yang dikeluarkan untuk menarik perhatian bangsa Indonesia adalah: 1. Memberikan bantuan dana bagi sekolah termasuk madrasah. 2. Mengangkat kalangan kyai, seperti, KH. Hasyim Asy'ari menjadi pemimpin di Kantor Urusan Agama. Di antara tugasnya adalah mengorganisir pertemuan dan pembinaan guru-guru agama. Dengan alasan pertemuan dan pembinaan inilah pendidikan Islam pesantren dan madrasah tetap dapat

dipantau dan dikontrol dengan mudah oleh bangsa Jepang. 3. Diizinkannya pendirian Perguruan Tinggi Islam di daerah Jakarta (Hoddin, 2020).

Bangsa Jepang juga melakukan upaya Indoktrinasi. Upaya Indoktrinasi Jepang kepada bangsa Indonesia adalah dengan membentuk sebuah wadah pelatihan perjuangan, seperti : *Seindojo* (Panti Latihan Militer), *Seinekurenscho* (Pusat Latihan Pemuda), *Seindean* (Barisan Pemuda), *Keibodan* (Barisan Pembantu Polisi), Peta (Pembela Tanah Air) dan juga *Hizbullah* yang banyak diikuti kalangan santri dan kiai yang mereka diasramakan agar upaya indoktrinasi lebih masif dilakukan. Jepang memang cerdik sekaligus licik, sebab Jepang tahu, ulama merupakan alat yang paling efektif untuk menyebarkan pengaruh di masyarakat pedesaan, orang-orang Jepang bersikap tidak seperti Belanda bahkan Jepang memperlihatkan sikap yang berlawanan dengan kolonial Belanda. Mereka mengakui dan berusaha merangkul dengan niat untuk memanfaatkan posisi kunci dan strategis kaum ulama di tengah masyarakat Indonesia (Rohman, 2018).

Namun ditemukan juga sebuah fakta, bahwa semenjak Jepang datang dan menduduki nusantara telah banyak sekolah dan madrasah yang terpaksa ditutup. Bahkan dengan terpaksa di antara sekolah dan madrasah itu ditutup sendiri oleh para pendirinya dan gurunya karena takut kepada Jepang, apalagi demi menghindari suatu ritual upacara yang dinamakan *Saekere* yaitu ritual membungkukkan badan ke arah Tokyo yang menjadi kewajiban pada saat itu sebagai simbol menghormati Kaisar Tenno Haika yang harus dilakukan setiap pagi. Hal semacam ini tentu sangat menyakitkan hati umat Islam dan bisa menjadi bentuk kesirikan. Bagi siapa yang menolak ritual tersebut oleh Jepang

akan dipukul, dihardik bahkan dicaci-maki, walaupun pada akhirnya, Jepang memang mengembalikan eksistensi dan posisi pendidikan Islam kepada umat Islam sebagaimana mestinya (Saifudin & Saepuddin, 2020).

Selagi ada angin segar yang diberikan oleh Jepang madrasah-madrasah pun dibangun dengan gencar. Walaupun dapat difahami bahwa hal ini lebih bersifat politis belaka saja. Namun, kesempatan ini memang tidak disia-siakan begitu saja oleh umat Islam Indonesia sehingga benar-benar memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Hasilnya di Sumatera berdiri madrasah Awaliyah yang diilhami oleh Majelis Islam Tinggi. Bahkan hampir seluruh pelosok desa ditemukan Madrasah Awaliyah yang dikunjungi banyak anak-anak laki-laki dan perempuan. Madrasah Awaliyah ini beroperasi pada waktu sore hari dengan waktu belajar kurang dari satu setengah jam dengan materi yang diajarkan yaitu membaca al Quran, tata cara ibadah dan akhlak (Saifudin & Saepuddin, 2020). Selain itu pada sekolah Negeri juga diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal tersebut memberikan kesempatan besar bagi para guru agama Islam untuk mengisinya dengan pelajaran budi pekerti berdasarkan ajaran agama Islam dan didalam pendidikan berdasar agama tersebut itu pula dimasukkan ajaran tentang pelajaran pentingnya jihad melawan penjajah. Selain itu berdiri pula Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta (Lismayarti & Khairiyah, 2025).

Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang penggunaan bahasa Inggris dan Belanda sangat amat dilarang untuk dipakai dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, begitu juga dengan bahasa Arab yang semula boleh digunakan, akhirnya dilarang juga penggunaannya. Pelarangan tersebut juga berlaku dalam kegiatan pendidikan di sekolah-

sekolah termasuk dalam pendidikan Islam. Pemerintah Jepang hanya mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dan Jepang saja. Tujuan pelarangan penggunaan bahasa-bahasa tersebut terutama terhadap bahasa Belanda adalah tentu untuk menghilangkan pengaruh bangsa Belanda yang telah sekian lama menjajah Indonesia (Rohman, 2018).

Ternyata hal tersebut memberikan dampak yang positif, dari kebijakan inilah penggunaan bahasa Indonesia memberikan perkembangan yang baik pada bahasa Indonesia itu sendiri, sebab dipakai dalam segala aspek pendidikan. Selama masa pendudukan bangsa Jepang ini pulalah bahasa Indonesia berkembang dan dimodernkan dan menjadi bahasa pergaulan sehari-hari dan menjadi bahasa ilmiah. Dampak positif ini juga dirasakan oleh penduduk yang tinggal di pedesaan, mereka yang sebelumnya tidak mengenali bahasa Indonesia menjadi lebih mengenali bahasa negerinya sendiri (Rohman, 2018).

Selanjutnya, selama Jepang menjajah Indonesia hampir setiap harinya di sekolah-sekolah hanya diisi dengan kegiatan latihan perang atau bekerja. Hampir bisa dipastikan semua kegiatan-kegiatan di sekolah tidak jauh dari konteks peperangan. Kegiatan tersebut, seperti mengumpulkan batu dan pasir untuk kepentingan perang, membersihkan bengkel-bengkel dan asrama militer, menanam ubi-ubian dan sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan bahan makanan, setiap pagi wajib mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Benar memang kehadiran Jepang di Indonesia memiliki dampak yang positif yakni ternanamnya jiwa berani pada bangsa Indonesia itu. Akan tetapi semua itu dilakukan untuk memanfaatkan bangsa Indonesia untuk kepentingan Jepang nantinya (Rohman, 2018).

Pada masa pemerintahan Jepang diferensiasi Pendidikan dihapuskan, apa yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda yakni diferensiasi Pendidikan tidak dilakukan oleh pemerintah Jepang. Jepang menerapkan kebijakan yang berbeda, Jepang melakukan penyeragaman sekolah bagi seluruh penduduk Indonesia baik dari golongan atas yakni Bangsawan dan sejenisnya maupun dari golongan bawah yakni Rakyat jelata. Dalam kebijakan Jepang golongan apapun dia mempunyai kesempatan untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang sama dan setara. Disinilah paradigma yang cukup tajam dan berbeda dari politik pecah belah (*divide et impera*) Belanda diganti dengan politik integrasi (Rohman, 2018).

Karena dihapusnya sistem penggolongan, baik menurut bangsa maupun menurut status sosial, maka beberapa perubahan mendasar terjadi sebagaimana berikut:

1. Jenjang Sekolah Dasar atau Sekolah Rakyat (*Kekumin Gakko*). Lama pendidikannya enam tahun. Sekolah ini ada di semua desa dan kota atau tempat yang dulunya terdapat Sekolah Dasar, Sekolah Kelas Satu, Kelas Dua atau HIS dan ELS.
2. Jenjang Sekolah Lanjutan Pertama (*Shoto Chu Gakko*) atau sekarang disebut SMP yang terbuka bagi semua golongan penduduk yang memiliki Ijazah SR. Untuk Sekolah Kejuruan terdapat Sekolah Pertukangan (*Kogyo Gakko*), Sekolah Pertanian (*Nogyo Gakko*) dan Sekolah Pelayaran. Lama pendidikannya adalah tiga tahun.
3. Jenjang sekolah lanjutan umum tingkat atas (*Kota Chu Gakko*). Lama pendidikannya 3 tahun.

4. Jenjang Sekolah Tinggi. Mirisnya pada tingkat ini hampir seluruh sekolah tinggi ditutup kecuali Sekolah Kedokteran Tinggi (*Ika Dai Gakko*) dan Sekolah Obat (*Yaku Gakko*) di Jakarta, Sekolah Kedokteran Gigi (*Sika Gakko*) di Surabaya, Sekolah Teknik Tinggi (*Kogyo Dai Dakko*) yang dibuka tahun 1944 di Bandung, Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor, Akademi pemerintahan (*Kenkoku Gakko In*) yang dibuka pada awal tahun 1945 di Jakarta sebagai ganti MOSVIA pada masa Belanda (Rohman, 2018).

Selain itu pemerintah Jepang juga membuka sekolah pendidikan guru. Terdapat tiga jenis pendidikan guru, yaitu:

1. Sekolah Guru (SG) yang dinamakan *Sjootoo Sihan Gakko* selama 2 tahun.
2. Sekolah Guru Menengah (SGM) yang dinamakan *Guutoo Sihan Gakko* selama 4 tahun.
3. Sekolah Guru Tinggi (SGT) yang dinamakan *Kootoo Sihan Gakkoo* selama 6 tahun (Rohman, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendudukan Jepang di Indonesia memberikan dampak pada dunia Pendidikan Islam Indonesia. Adapun kebijakan-kebijakan politik Jepang terhadap pendidikan Islam di Indonesia adalah memberikan bantuan dana bagi sekolah termasuk madrasah, mengangkat kalangan kyai, seperti, KH. Hasyim Asy'ari menjadi pemimpin di Kantor Urusan Agama untuk mengorganisir pertemuan dan pembinaan guru-guru agama, agar dari pertemuan dan pembinaan inilah pendidikan Islam pesantren dan madrasah tetap dapat dipantau dan dikontrol oleh bangsa Jepang, diizinkan pendirian Perguruan Tinggi Islam di daerah Jakarta, indoktrinasi, pemaksaan ritual

Saekere yaitu ritual membungkukkan badan ke arah Tokyo sebagai simbol menghormati Kaisar Tenno Haika yang harus dilakukan setiap pagi, pelarangan penggunaan bahasa Inggris, Belanda dan bahasa Arab, materi pendidikan fokus pada konteks peperangan, penghapusan sistem golongan yang menghasilkan jenjang pendidikan yang sama dan setara dan diadakannya sekolah khusus pendidikan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslan, Hifza. (2019). Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang di Sambas, Indonesia. *Edukasia Islamika*, 4(2), 171–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jei.v4i2.2295>
- Hoddin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra' Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan [FTIK] IAIN Manado*, 14(1), 15–30.
- Hudaidah, Karwana, M. A. P. (2021). PENDIDIKAN DI INDONESIA MASA PENDUDUKAN JEPANG. *Danadyaksa Historica*, 1(2), 97–104.
- Lismayarti, Khairiyah, A. (2025). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA PRA KEMERDEKAAN KEBIJAKAN POLITIK BELANDA DAN JEPANG TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM. *An Najah: Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama*, 04(05), 1–6.
- Ramadhani, S. (2021). Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan & Inovator Pendidikan*, 8(1), 10–23. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.29408/jhm.v8i1.3410>

Rohman, M. (2018). KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN JEPANG. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 02(01), 15–33.

Saifudin, D. Saepuddin. (2020). Pengaruh kolonialisme Jepang terhadap pendidikan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 164–177. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i2.3441>.